

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Darmaningtyas, Edi Subkhan, Ismail Fahmi, 2009, *Tirani Kapital dalam Pendidikan: Menolak UU BHP*, Pustaka Yashiba dan Damar Press, Yogyakarta.
- Emzir dan Sam Muchtar, 2010, *Isu-Isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fatkurohman, Dian dan Sirajudin, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ghofar, Abdul, 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ilmar, Aminudin, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Indrajit, Eko dan Djokopranoto, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Kartono, Kartini, 1997, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional Beberapa Kritik dan Sugesti*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional*, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Jilid 1*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Latif, Abdul, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, Muhammad Syarif Nuh, Hamza Baharuddin, H. Hasbi Ali, 2009, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total media, Yogyakarta.

- Mahfud MD, Moh., 2010, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2006, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Nugroho, Heru, 2002, *McDonaldisasi Pendidikan Tinggi*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Rohman, Arif dan Teguh Wiyono, 2010, *Education Policy in Decentralization Era*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Siahaan, Maruarar, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Suriasumantri, Jujur S., 1986, *Ilmu dalam Prespektif Moral, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog Tentang Keilmuan Dewasa Ini*, Gramedia, Jakarta.
- Utrecht, E., 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cet. IV, Ichtiar, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Hasil Penelitian**

- Mercy, Monika, 2010, *Perubahan Status Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Ditinjau dari Hukum Pengelolaan Keuangan Negara*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Wicaksana, Kusahya, 2010, *Implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi Tentang Anggaran Bidang Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2008*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Zain, Mochamad Adib, 2013, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Politik Hukum Sistem Pendidikan Nasional*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### C. Artikel Internet

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “*Pemerintah Kesulitan Terjemahkan Putusan MK*”, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10856#.WGdd1PmLTIV>, diakses 31 Desember 2016.

Putra, Galih R. N., “*Politik Pendidikan*”, [https://books.google.co.id/books?id=AyXiCwAAQBAJ&pg=PA204&lpg=PA204&dq=bhmn+pendidikan+tinggi&source=bl&ots=G\\_sDIgT-U9&sig=I\\_6Wj91-xy6wrYT\\_w\\_ZX\\_dhBi9I&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjtp4\\_K\\_bnQAh\\_WLpY8KHTMtApw4HhDoAQgYMAA#v=onepage&q=bhmn%20pendidikan%20tinggi&f=false](https://books.google.co.id/books?id=AyXiCwAAQBAJ&pg=PA204&lpg=PA204&dq=bhmn+pendidikan+tinggi&source=bl&ots=G_sDIgT-U9&sig=I_6Wj91-xy6wrYT_w_ZX_dhBi9I&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjtp4_K_bnQAh_WLpY8KHTMtApw4HhDoAQgYMAA#v=onepage&q=bhmn%20pendidikan%20tinggi&f=false), diakses 1 Desember 2016.

Wahab, Rochmad, “*Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Ditinjau dari Prespektif Filosofis dan Filosofis*”, [http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Rochmat\\_Wahab\\_M.Pd.,MA.Dr.,Prof./PT-BHMN\(R\).pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Rochmat_Wahab_M.Pd.,MA.Dr.,Prof./PT-BHMN(R).pdf), diakses 1 Desember 2016.

### D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859).

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105).

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493).

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1320).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1363).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670).

#### **E. Putusan Badan Peradilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PPU/-VII/2009 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 28 Januari 2010.